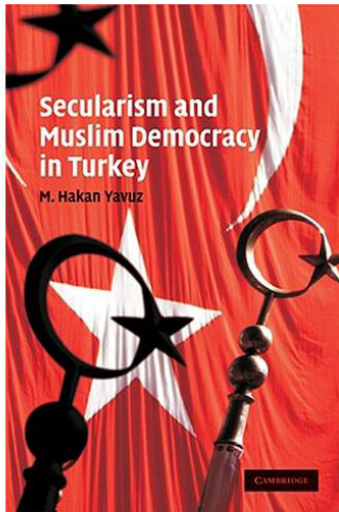


Book Review

Ihsan Ali-Fauzi

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina

E-mail: ihsanaf@yahoo.com



Judul : Secularism and Muslim Democracy in Turkey

Penulis : Hakan Yavuz

Penerbit : Cambridge University Press

Tahun : 2009

Abstract

In 2002, The AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), which supported by Islamists, won elections in Turkey. Since then, the AKP has grown more in line with its harsh ideological position and adopted a more conservative approach and the full support of democracy. What factors could explain the AKP's victory and the party's change even further? In this book, M. Hasan Yavuz showed that an open and democratic political system has encouraged radically religious groups to moderate their political practices and ideologies, to win the election. It also sustained by good economic conditions and a healthy public space, which allows for the negotiation of various differences openly and peacefully. The AKP's victory in 2007 elections further solidified this view: the common political reality will ultimately defeat the ideological and dogmatic rigidity that Islamic radical had before.

Keywords: Turkey; Islam; Democracy

Abstrak

Pada 2002, AKP (*Partai Keadilan dan Pembangunan*), yang didukung kalangan Islamis, memenangkan pemilu di Turki. Sejak itu, AKP makin meninggalkan posisi ideologisnya yang beraliran keras dan mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dan mendukung penuh demokrasi. Faktor-faktor apa saja yang bisa menjelaskan kemenangan AKP dan perubahan partai ini lebih jauh? Dalam buku ini, M. Hakan Yavuz menunjukkan bahwa sistem politik Turki yang terbuka dan demokratis telah mendorong kelompok-kelompok keagamaan yang semula radikal untuk memoderasi praktik dan ideologi politik mereka, dalam rangka memenangkan pemilu. Ini juga ditopang oleh kondisi ekonomi yang baik dan ruang publik yang sehat, yang memungkinkan dinegosiasikannya berbagai perbedaan secara terbuka dan damai. Kemenangan lagi AKP pada pemilu 2007 makin memperkokoh pandangan ini: bahwa realitas politik sehari-hari pada akhirnya akan mengalahkan kekakuan ideologi dan dogma yang semula dipeluk kalangan Islamis radikal.

Kata kunci: Turki; Islam; Demokrasi

Banyak sarjana dan pembambil kebijakan yang berpandangan bahwa sekularisme adalah prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi. Jika demikian, apakah mungkin gerakan-gerakan politik yang didorong oleh gairah keagamaan tertentu, yang menentang sekularisme, menjadi penggerak demokratisasi atau bahkan liberalisasi?

Inilah pertanyaan yang hendak dijawab buku ini, dengan mengambil kasus gerakan Islamis di Turki. Penulisnya, M. Hakan Yavuz, adalah Profesor Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik dan Pusat Studi Timur Tengah pada University of Utah, Amerika Serikat. Belakangan dia tampil sebagai sarjana dan komentator yang menonjol mengenai politik Islam di Timur Tengah, khususnya Turki, dan antara lain menulis *Islamic Political Identity in Turkey* (2005) dan *The Emergence of a New Turkey: Democracy and AK Parti* (2006).

Tesis utama Yavuz sudah dikemukakan di awal bukunya: kelompok-kelompok keagamaan radikal akan memoderasi praktik dan ideologi mereka ketika mereka masuk dan berpartisipasi dalam sebuah sistem politik demokratis. Ini karena keterbukaan politik yang mencirikan sistem politik ini akan mendorong para pemimpin kelompok di atas untuk meninjau-ulang dan memoderasi tafsir-tafsir keagamaan yang kaku yang melandasi praktik dan ideologi politik mereka. Hal ini pada gilirannya akan memecahkan kebuntuan atau kesulitan dialog di antara kelompok-kelompok agama dan sekular atau liberal, karena kedua kelompok kini

memiliki saluran lebih banyak untuk berkomunikasi secara langsung, yang dapat melumerkan blok-blok politik yang semula bersifat monolitik dan homogen. Hal ini makin dimungkinkan jika tersedia dua kondisi: sistem ekonomi pasar (liberal) yang berfungsi dengan baik, dan ruang publik yang sehat, yang memungkinkan terjadinya dialog dan pertukaran di antara berbagai gagasan dan identitas yang berbeda.

Inilah yang dilihat Yavuz terjadi di Turki, terutama dengan tampilnya AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) sebagai pemenang pemilu tahun 2002 dan 2007. Dalam buku ini, dia menjelaskan kemenangan itu melalui model interaktif hubungan saling pengaruh antara faktor-faktor struktural, seperti sistem politik dan kondisi ekonomi, dan peran aktor, yakni kemampuan para pemimpin gerakan Islamis untuk membaca dan menafsirkan kembali tradisi keagamaan mereka agar sejalan dengan berbagai tantangan baru, termasuk demokrasi.

Menurut Yavuz, kesuksesan AKP pertama-tama ditopang oleh terjadinya apa yang dia sebut “revolusi [di kalangan] konservatif.” Revolusi ini bermula pada tumbuhnya kalangan borjuis Anatolia pada 1980, sebagiannya Islamis, yang memanfaatkan langkah-langkah liberalisasi ekonomi di Turki yang diperkenalkan Perdana Menteri Turgut Özal (dari Partai Ibu Pertiwi). Bagi Yavuz, tumbuhnya kelas menengah ini, yang dipaparkan cukup detail, merupakan faktor kunci keberhasilan AKP. Merekalah yang menopang tumbuhnya industri penerbitan (buku-buku dan media massa Islam, termasuk televisi), yang pada gilirannya membuka kesempatan bagi ditampilkannya tawaran-tawaran alternatif Islamis kepada publik.

Yavuz juga menjelaskan bahwa kalangan borjuis Muslim di atas, termasuk kalangan petinggi AKP, melakukan “kompromi historis” dengan Kemalis (pendukung sekularisme Kemal Ataturk). Ini terjadi karena kelompok yang terakhir ini sendiri, termasuk kalangan militer yang menjadi penjaga gawang sekularisme Turki, mulai menerima demokrasi dan bersikap terbuka terhadap ekonomi dunia.

Salah satu kompromi historis itu dilakukan para pemimpin AKP pada awal 2000-an, sebagai reaksi atas dua peristiwa: (1) dikeluarkannya memorandum pejabat tertinggi militer Turki, pada 28 Februari 1997, yang mendesak agar koalisi pemerintahan yang terdiri dari Partai Kesejahteraan (Islamis) dan Partai Demokrat (nasionalis) membubarkan diri dan meletakkan jabatan; dan (2) ditutupnya Partai Kebajikan (Islamis) pada 2001, juga oleh petinggi militer. Menanggapi situasi ini, Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gül dan banyak pemimpin AKP lainnya

sampai pada kesimpulan bahwa sebuah partai Islam yang terbuka adalah sesuatu yang tidak mungkin di Turki.

Karena alasan di atas, maka baik dengan sadar atau terpaksa, kader-kader AKP mulai melakukan langkah-langkah penting ke arah demokratisasi, yang pada akhirnya memperlemah kekuatan institusional kelompok militer sendiri. Konsekuensinya, AKP sebagai partai itu sendiri mengubah identitasnya, dari radikal menjadi moderat. Apakah itu sekadar taktik atau sungguhan, sulit bagi kita untuk mengetahuinya dengan pasti.

Bagi Yavuz, faktor-faktor di atas menjadikan AKP lebih diterima oleh kalangan non-Islamis, termasuk kalangan borjuis. Di luar negeri, mereka juga tidak lagi dicurigai oleh para politisi Masyarakat Eropa, yang sangat penting bagi masa depan ekonomi Turki. Maka tak heran jika sebuah survei yang dilakukan pada 2003 menunjukkan bahwa para pendukung AKP menyebut identitas politik mereka sebagai berikut: 27% Islamis, 15% sayap-kanan, 14% demokrat, 10% konservatif, 10% sosial demokrat, 6% nasionalis, 3% Kemalists, 3% nasionalis-konservatif, dan 10% tidak tahu. Data ini menunjukkan, sekalipun mayoritas pendukung AKP masih memegang teguh Islamisme, segala jenis ideologi terwakili dalam partai ini.

Syukurnya, di tengah dukungan dari berbagai sektor itu, para petinggi AKP tetap bisa menarik diri dari godaan untuk kembali ke kepompong lama, Islamisme radikal, dan tetap setia pada kebijakan ekonomi yang berorientasi liberal, pro-pasar dan terbuka pada globalisasi. Inilah yang menjadi minyak pertumbuhan ekonomi Turki yang mengagumkan di bawah AKP dan memberinya kembali mandat untuk berkuasa pada pemilu 2007.

Godaan untuk kembali ke Islamisme radikal bukan tak ada. Yavuz mencatat, ada "kecenderungan otoritarian" pada diri Erdogan. Dia misalnya pernah berniat menggantikan Kemalisme dengan suatu rezim yang lebih kondusif bagi nilai-nilai Islam. Bagi Yavuz, Erdogan adalah seseorang yang "karismatis tetapi lemah secara intelektual; populer tetapi sombong." Dalam bukunya, Yavuz juga menyertakan banyak kutipan dari Erdogan, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang anti-intelektual dan politisi pragmatis. Dalam banyak kesempatan, dia bicara tentang ketidaksukaannya pada buku-buku dan bagaimana realitas sehari-hari tidak dapat ditemukannya di sana. Yavuz juga mencatat bahwa AKP adalah partai yang sangat didominasi laki-laki dan di puncaknya berdiri hanya segelintir kecil orang berpengaruh yang mengelilingi Erdogan yang kata-katanya sangat diikuti.

Tapi Yavuz yakin bahwa demokrasi yang berkembang di Turki sekarang sudah praktis menutup pintu bagi kembalinya AKP ke Islamisme mereka yang lama dan radikal. AKP kini memang masih menekankan pentingnya nilai-nilai Islam bagi bangsa Turki, tetapi para pemimpinnya sudah tidak punya hasrat untuk mendesakkan hukum-hukum Islam sebagai hukum nasional. Itu terlepas dari fakta bahwa istri-istri presiden, perdana menteri dan sejumlah pengurus AKP yang menentukan mengenakan kerudung di ruang publik, mewakili suatu gaya-hidup baru yang belum pernah kita saksikan di Turki hingga 2002.

Dengan latar belakang ini, dalam satu bab bukunya, Yavuz bicara tentang tiga model sekularisme di Turki. Pertama sekularisme seperti dalam formulasi Kelamis, yang disebutnya "bebas dari agama," yang membatasi agama sebagai hanya masalah kesadaran seseorang. Model kedua adalah sekularisme di mana agama dikontrol oleh kalangan konservatif dan partai-partai agama, yang menjadikan Islam sebagai komponen penting identitas Turki dan membiarkannya memainkan peran penting dalam masyarakat, tetapi tidak serta-merta dalam politik. Sedang model ketiga adalah pemisahan agama dan negara seperti dikampanyekan kalangan liberal dan kelompok Alevi. Menurutnya, sekularisme Turki di bawah AKP adalah sekularisme model kedua.

Buku ini jelas menawarkan jawaban teoretis dan empiris, meskipun hanya dari kasus Turki, terhadap sejumlah pertanyaan penting tentang hubungan antara agama (Islam), sekularisme dan demokrasi. Kekuatan pokoknya terletak pada penguasaan penulisnya terhadap subjek yang dibahasnya: Yavuz bukan saja mengerti perdebatan teoretis mengenai tempat agama dalam demokrasi dan persaingannya dengan sekularisme, tapi juga seperti memahami benar segala seluk-beluk politik Turki. Tantang yang terakhir, dia sendiri memang orang Turki, sehingga studinya ditopang oleh sumber-sumber utama yang diterbitkan dalam bahasa Turki dan wawancara mendalam dengan banyak narasumber di negara itu.

Akhirnya, baik dari sudut pandang akademis maupun kebijakan, buku ini dapat dipastikan akan menjadi salah satu sumber utama diskusi mendatang mengenai tempat agama dan sekularisme dalam demokrasi. Ini terutama karena Turki di bawah AKP makin berkembang sebagai salah satu negara maju, yang juga lebih berpengaruh dalam politik internasional, dan menjadi kasus lain (pengecualian) dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di dunia.[]

